

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai salah satu bagian penting dalam proses pembangunan nasional merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara, oleh karenanya pendidikan di pandang sebagai suatu investasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

Penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan karakteristik, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dimana transaksi layanan tersebut dilakukan, pendidikan hendaknya mampu memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah. Seirama dengan upaya tersebut, maka dalam setiap perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan-keputusan pendidikan hendaknya tidak saja berorientasi pada masa kini yang pragmatis, akan tetapi hendaknya perlu berorientasi ke masa depan yang mampu memenuhi tuntutan jangka panjang kebutuhan masyarakat.

Meskipun reformasi politik dan ekonomi terus dijalankan di Indonesia, negara ini masih dihadapkan pada krisis finansial yang menuntut adanya penghematan dan pengurangan dalam anggaran. Lebih dari itu, anggaran nasional untuk sektor pendidikan akan berkurang sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia untuk mendesentralisasikan

formula-formula pendanaannya. Diharapkan bahwa pemerintah daerah akan menangani hal-hal yang tidak lagi ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga dalam penganggarannya sektor pendidikan tidak dikalahkan oleh sektor-sektor lain, akan tetapi, dalam jangka pendek, keterbatasan dana hampir tidak bisa dihindarkan, dalam hal ini menuntut masyarakat untuk memainkan peranannya yang lebih besar dalam ikut menanggung biaya pendidikan, dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Dengan semakin meningkatnya kontribusi masyarakat itu, maka mereka juga berhak untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (pada tataran lokal atau sekolah).

Sementara itu, pendidikan nasional dihadapkan kepada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan pendidikan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua. (Nanang F.,2000:78).

Masalah perluasan kesempatan pendidikan merupakan dampak nyata dalam memberikan tempat pada demokratis pendidikan, sebagai pendidikan nasional selalu dihadapkan pada masalah kualitas dan kuantitas. Masalah kualitas terdesak oleh pemikiran kuantitas, terlebih pada masa krisis ekonomi dimana daya dukung ekonomi keluarga semakin melemah yang mengakibatkan banyak usia sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah.

Berdasarkan prespektif ekonomi, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi lulusan pendidikan secara langsung dapat memenuhi angkatan kerja di berbagai sektor ekonomi. Dengan bekerjanya mereka, pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi.

Sedangkan menurut perspektif pendidikan melihat kualitas pendidikan dari sisi pengadaan dari proses belajar mengajar dan dari segi kemampuan lulusan dalam hal memecahkan masalah dan berfikir kritis.

Kualitas dari segi proses mengandung arti efektifitas atau kesepakatan dan efisiensi keseluruhan faktor-faktor atau unsur-unsur yang berperan dalam proses pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas dan perluasan kesempatan belajar yang efektif dan efisien akan dapat dicapai apabila tersedia biaya yang mencukupi. Untuk menyediakan berbagai sumber dan fasilitas yang dibutuhkan, sehubungan dengan kualitas yang diharapkan, relevansinya harga tidaklah murah. Oleh karenanya, proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menuntut tersedianya alokasi dana yang besar dan menuntut pelaksanaan manajemen yang baik.

Kualitas pendidikan ini bersifat multi dimensi yang meliputi aspek-aspek input, proses dan keluaran (hasil atau dampak). Oleh karena itu indikator atau standar mutu pendidikan dikembangkan dari aspek input, proses dan keluaran.

Faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan kualitas pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil adalah, *pertama* strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori *Education Production Function* (Hanushek, 1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. (Umaedi, 1999:2).

Di samping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus

dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan. hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya, terutama dalam hal pengalokasian dana atau biaya pendidikan untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Akhirnya karena kualitas merupakan cerminan dan kepentingan, harapan, kegunaan, citarasa serta faktor sikap lainnya yang ada pada setiap saat akan berubah dan meningkat, maka evaluasi terhadap kualitas pendidikan dan hasil dari lembaga pendidikan perlu dilakukan secara periodik, termasuk di dalamnya adalah upaya mengkaji ulang indikator-indikator dan standar kualitas.

B. Permasalahan Penelitian

Pembiayaan pendidikan memiliki lingkup dan pembahasan yang sangat luas, baik dari sifat, karakteristik maupun jenisnya dan salah satu kelemahan utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional adalah manajemen. Organisasi pendidikan nasional sungguh sangat besar dan lebar. Proses manajemen lamban, berliku panjang dan tidak konsisten. Karena itu aliran dana pemanfaatan dana menjadi tidak efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang timbul di sekolah menengah umum yang akan diteliti berkaitan dengan proses pengelolaan atau pelaksanaan penetapan alokasi dana yang diterima oleh

setiap sekolah dari pemerintah dan orang tua siswa atau masyarakat serta stake holder.

Permasalahan tersebut muncul akibat dana yang diberikan dari pemerintah kurang mencukupi untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat dan industri, hal ini terjadi karena anggaran yang diberikan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pemerintah, disebabkan karena faktor kondisi perekonomian negara yang selalu berfluktuasi dalam menjalankan proses pembangunannya.

Sehingga, untuk menanggulangi kekurangannya, maka dibebankan kepada siswa dalam hal ini orang tua yang bertanggungjawab untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolah dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar anak didiknya, serta masyarakat dan stake holder yang mempunyai kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Tetapi kenyataannya, pihak orang tua siswa dan peran masyarakat kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan proses pembelajarannya, Sedangkan sumber dana untuk penggantinya terbatas karena telah ditetapkan untuk keperluan yang lainnya, maka pihak sekolah hanya dapat mengantisipasinya dengan mengurangi alokasi anggaran dari salah satu pos-pos anggaran yang telah ditetapkan seperti (1). Kurikulum dan kegiatan belajar mengajar, (2). Peningkatan kegiatan pembinaan siswa, (3). Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, (4).

Hubungan masyarakat dan kegiatan rumah tangga sekolah, dan (5). Kesejahteraan guru dan karyawan untuk peningkatan personil.

Hasil dari pengurangan tersebut di alihkan untuk menutupi salah satu pos anggaran yang masih dirasakan kurang untuk menjalankan proses kegiatan belajar yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, walaupun salah satu cara pemecahannya adalah dengan melaksanakan perimbangan biaya dengan jalan yaitu bagi orang tua siswa yang mampu, membantu orang tua siswa yang kurang mampu dalam membayar uang SPP atau BP3 (iuran bulanan). Tetapi, dampak yang dirasakan belum cukup untuk memenuhi standar pendidikan yang berkualitas.

Disamping itu, di lingkungan sekolah menengah umum tertentu masih terdapat kesulitan dalam menetapkan berapa biaya atau nilai estimasi suatu aktivitas yang harus dikeluarkan oleh sekolah untuk setiap siswa dalam menunjang proses belajar yang berkualitas.

Oleh karena itu, untuk lebih spesifik dan sesuai dengan latar belakang masalah dan fenomena yang dilihat dari penelitian dilapangan, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : "**Bagaimana Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan**", maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sehubungan dengan rumusan permasalahan tersebut di atas yaitu :

1. Kegiatan apakah yang dilakukan dalam proses perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah menengah umum ?



2. Seberapa besar implementasi pembiayaan pendidikan yang diterima di sekolah menengah umum ?
3. Kegiatan apakah yang dilakukan dalam proses pengawasan pembiayaan di sekolah menengah umum ?
4. Seberapa kuat pengaruh antara manajemen pembiayaan pendidikan dengan kualitas pendidikan di sekolah menengah umum ?

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir menurut Didi Atmadilaga (1989:13) adalah :

“Argumentasi dukungan landasan teoritik dalam rangka mengantisipasi jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Dengan lain perkataan, harus membangun teori sedemikian rupa sehingga mampu menjelaskan mekanisme proses timbulnya masalah, mampu menemukan cara untuk mencegahnya. Bahkan juga mampu untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada titik tolak kondisi yang telah diketahui (given)”.

Dalam proses pendidikan, agar dapat berjalan dengan baik dan berkualitas, maka perlu diperhitungkan pola pendistribusian keuangan persekolahan dan sumber-sumber lain untuk pendidikan. Dalam hal pendistribusian ini, menurut Jones (1985:43) terdapat dua kategori yaitu *“How the money will be raised and how it will spent”.*

Menurut Jones (1985:201), faktor atau hal-hal yang menentukan pengeluaran/pembiayaan pembelajaran dibedakan menjadi beberapa variabel yaitu

“Governmental variables—these would include the legal status of the school district-fiscal independence/dependence, grade coverage, and the type(s) of state aid formula used. Set of predictive variables are associateds with local economic conditions,

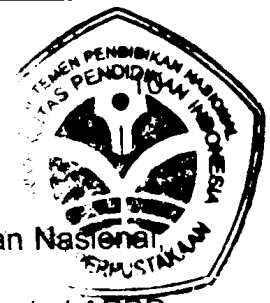
the property wealth of the school district, and the breakdown of property commercial, industrial, and residential categories, the personal incomes of school district resident, the number of unemployed persons. A third set of variables is demographic and social. These include the size of the school district and the population density, the educational attainments and occupational status of the school district voters, percentage of parents households, and the racial, ethnic, and religious composition of each district".

Oleh karena itu, pengukuran pengeluaran yang seimbang dengan pendapatan harus diukur dengan baik. Jones (1985:203) mengatakan bahwa :

"Several different single measures are used to summarize the degree of equality in a distribution, each of which gives a slightly different indication of conditions. Some measures are sensitive to changes only at the highest and lowest ends of the scale".

Persoalan seputar pendanaan pendidikan sangatlah kompleks, karena bukan saja disebabkan keterbatasan alokasi anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tetapi dana yang ada belum dapat dipergunakan sepenuhnya untuk mencapai sasaran pendidikan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, untuk meningkatkan anggaran pendidikan dibentuk komite reformasi pendidikan (KRP) yang pernah memasukan usulan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tengah dipersiapkan tentang presentase dana yang harus dialokasikan pemerintah, baik di dalam APBN maupun APBD. Presentase pengalokasian tersebut dimasukkan dalam pasal 52 RUU Sisdiknas yang dipersiapkan KRP. Pemerintah pusat diminta



mengalokasikan 15-25 persen dari total APBN untuk pendidikan Nasional, pemerintah provinsi minimum dapat mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk pendidikan menengah, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, dan pemerintah kabupaten/kota juga minimum 20 % dari APBD untuk pendidikan dasar, baik jalur sekolah maupun luar sekolah. (Kompas, 4 Desember 2001,29-30).

Persoalan tersebut tidaklah semudah yang diharapkan dan jauh dari jangkauan para pengelola pendidikan. Usulan tersebut menuntut komitmen pemerintah yang tinggi pada pendidikan dan melibatkan para pengambil kebijakan serta masyarakat secara luas. Secara sederhana dapat dikatakan, pemecahan atas minimnya alokasi anggaran adalah menambah alokasi anggaran dalam APBN dan APBD, seperti yang diusulkan oleh KRP. Tetapi nampaknya usulan ini sulit dilakukan mengingat permasalahan berat yang dihadapi pemerintah dalam anggarannya sering dijadikan alasan untuk mementahkan usulan ini. Selama ini, anggaran untuk pendidikan dana yang diperoleh hanya dari pinjaman luar negeri yang disediakan dalam APBN.

Dalam UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas, yang tidak menyebutkan secara jelas persoalan pendanaan pendidikan, dalam RUU usul inisiatif DPR tentang revisi UU No. 2 tahun 1989, persoalan pendanaan pendidikan disebutkan secara jelas dalam Bab XV, yang dibahas disini adalah tentang tanggungjawab pendanaan pendidikan dan pengelolaan pendidikan.

Tanggungjawab pendanaan pada semua jalur pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Pemerintah pusat dalam hal ini berkewajiban membantu pengalihan potensi-potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam pasal 54 ayat (1) RUU Sisdiknas menyebutkan, sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, sesuai kebutuhan atau memadai, stabilitas dan keberlanjutan. Ayat (2) menyebutkan, sumber pendanaan pendidikan dapat berasal dari pajak, hibah dan bantuan lain yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan. Dalam ayat (3) disebutkan, pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipungut dari kelompok masyarakat tertentu berdasarkan klasifikasi, kategori dan perhitungan secara progresif.

Hal yang tidak kalah penting dari usaha pengumpulan dana pendidikan adalah memastikan dana yang ada itu dapat dipergunakan sepenuhnya untuk mencapai sasaran pendidikan yang telah ditetapkan, serta menghapus kebocoran anggaran pendidikan.

Di samping itu, dalam menetapkan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh persekolahan dalam hal pendidikan, terdapat dua aspek utama pembiayaan, yaitu revenues dan alokasi. Kebijakan pembiayaan dan kebijakan pendidikan dalam proses penganggaran dan dalam alokasi dan distribusi tidak selalu dapat ditelusuri secara konsisten. Terdapat kecenderungan umum, bahwa antar kebijakan pembiayaan dan kebijakan

pendidikan masing-masing berjalan sendiri-sendiri, karena menciptakan koordinasi dan sinkronisasi kebijaksanaan pada tingkat nasional tampaknya tidak mudah dilakukan. (M. Fakry G., 2000:11).

Pengurangan pada anggaran pendidikan yang terjadi, menyebabkan sulitnya prioritas dan kebijakan pendidikan yang direfleksikan dalam pola pembiayaan, untuk dilaksanakan. Upaya yang dilakukan tampaknya hanya sekedar berfokus pada upaya, sehingga pendidikan nasional tetap dapat berjalan, walaupun dalam kondisi yang amat memprihatinkan.

Dalam hubungannya dengan kualitas pendidikan, Umaedi (1999:6) dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah menyatakan bahwa, sekolah diharapkan dapat bekerja pada koridor-koridor sebagai berikut :

Sumber daya; sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk : (i) memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, (ii) pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan (iii) pengurangan kebutuhan birokrasi pusat.

Pertanggung-jawaban (accountability); sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (accountability) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu.

Kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memiliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu;

- pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.
- bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
- pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.

Personil sekolah; sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepaia sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya).

Dalam peningkatan mutu tersebut, sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan termasuk anggarannya). Program tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan tahun itu dan tahun-tahun yang akan datang. Perencanaan program sekolah ini harus mencakup indikator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut sebagai proses peningkatan mutu pendidikan (misalnya kenaikan NEM rata-rata dalam prosentase tertentu, perolehan prestasi dalam

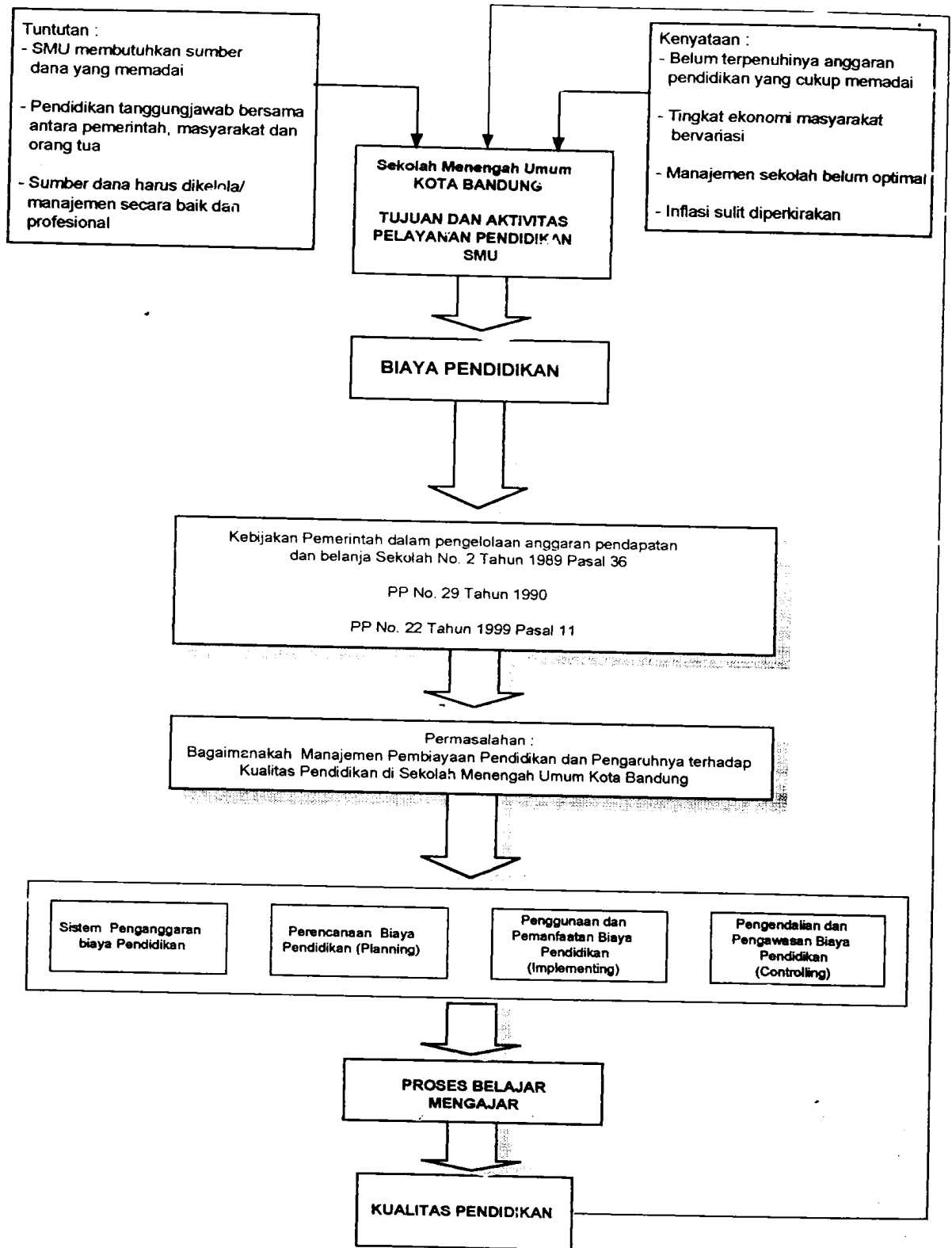
bidang keterampilan, olah raga, dsb). Program sekolah yang disusun bersama-sama antara sekolah, orang tua dan masyarakat ini sifatnya unik dan dimungkinkan berbeda antara satu sekolah dan sekolah lainnya sesuai dengan pelayanan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Karena fokus kita dalam mengimplementasikan konsep manajemen ini adalah mutu siswa, maka program yang disusun harus mendukung pengembangan kurikulum dengan memperhatikan kurikulum nasional yang telah ditetapkan, langkah untuk menyampaikannya di dalam proses pembelajaran dan siapa yang akan menyampaikannya.

Dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah kondisi alamiah total sumber daya yang tersedia dan prioritas untuk melaksanakan program. Oleh karena itu, sehubungan dengan keterbatasan sumber daya dimungkinkan bahwa program tertentu lebih penting dari program lainnya dalam memenuhi kebutuhan siswa untuk belajar. Kondisi ini mendorong sekolah untuk menentukan skala prioritas dalam melaksanakan program tersebut. Seringkali prioritas ini dikaitkan dengan pengadaan preralatan bukan kepada output pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah harus membuat skala prioritas yang mengacu kepada program-program pembelajaran bagi siswa.

Sementara persetujuan dari proses pendanaan bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan keuangan melainkan harus merefleksikan kebijakan dan prioritas tersebut. Anggaran harus jelas terkait dengan

program yang mendukung pencapaian target mutu. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan pada perencanaan sebelum sejumlah program dan pendanaan disetujui atau ditetapkan.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam konteks pendekatan kualitas pendidikan dapat digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran, yang tampak dalam tabel berikut ini :



Gambar : Skema Kerangka Pikiran

D. Paradigma Penelitian

Paradigma, menurut Bogdan dan Biklen (1982:32), adalah "Kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dalam penelitian".

Sedangkan menurut Thomas S. Kuhn (2000:22) paradigma adalah :

"Model atau pola yang diterima, dan aspek maknanya itu telah memungkinkan saya (peneliti) untuk mengambil "paradigma" bagi keperluan sendiri di sini. Akan tetapi, seperti keputusan yudikatif yang diterima dalam hukum tak tertulis, ia adalah objek bagi pengutaraan dan rincian lebih lanjut dalam keadaan yang baru atau yang lebih keras".

Dalam penelitian ini, paradigma dipergunakan dalam memecahkan masalah untuk mencapai keberhasilan dalam suatu penelitian yang akan dilakukan dengan efektif. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Thomas S. Kuhn (2000:17), bahwa "Hanya paradigma itu yang dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan jauh lebih efektif".

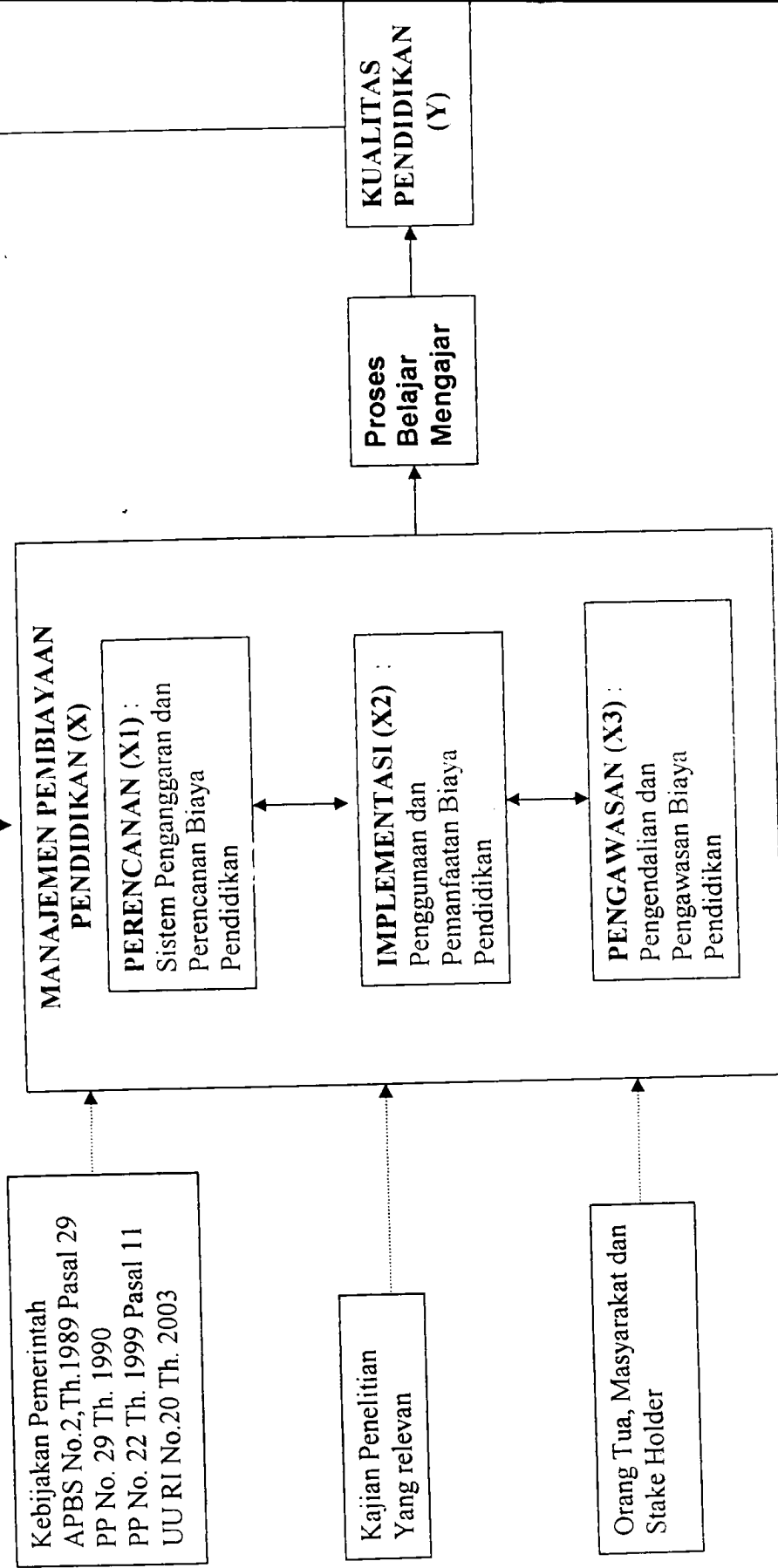
Berdasarkan kepada pemikiran Zymelman (1975) tentang pembiayaan pendidikan yang mengatakan bahwa "Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana, tetapi juga menyangkut penggunaan dana-dana itu secara efisien. Makin efisien sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan itu".

Oleh karena itu, dengan pengelolaan dana secara baik akan membantu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya dengan anggaran yang tersedia dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih

produktif, efektif, efisien dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan dan masyarakat.

Bersama-sama dengan unsur administrasi pendidikan yang lainnya, seperti manusia/personil, fasilitas, dan teknologi pendidikan, dana berfungsi untuk kemudian menghasilkan keluaran tertentu yang menunjang keberhasilan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Apabila dana yang diperlukan telah cukup tersedia, maka dituntut adanya pengelolaan yang cermat terhadap sumber-sumber dana. Artinya selain memikirkan beberapa jumlah dana yang mencukupi kebutuhan pendidikan perlu juga dipikirkan dari mana dana tersebut diperoleh.

Berdasarkan Uraian tersebut, maka paradigma dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.2. : Paradigma Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pendidikan



E. Asumsi

Pada prinsipnya, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia kaffah (*high quality human resources*), karena proses pendidikan merupakan suatu *life long process*, dimana dalam penerapannya tersebut sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal yang paling essensial dalam pendidikan adalah pembelajaran sepanjang hayat, dimana bentuknya bisa formal, non-formal dan informal.

Dalam hal ini, pembiayaan pendidikan berfungsi untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik (*to facilitate better learning*), sehingga hasilnya mempunyai standar yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka asumsi penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat keterkaitan antara manajemen pembiayaan pendidikan, terhadap kualitas output atau hasil akhir dari suatu proses pendidikan.
2. Penyusunan perencanaan pembiayaan pendidikan sangat diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik dan berpengaruh signifikan dalam menjalankan proses pendidikan yang berkualitas.
3. Besarnya jumlah biaya pendidikan yang diperoleh oleh sekolah, akan dipergunakan dan dimanfaatkan (diimplementasikan) untuk proses pendidikan yang tingkat pengeluarannya berdasarkan pada pos-pos anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya

pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan, dan tenaga pendidik yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar (R.L Johns, E. L. morphet, K. Alexander, 1983. Dalam Nanang Fatah,2000 :108).

4. Pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan, dilakukan dengan maksud untuk mengukur, membandingkan, dan menilai dari alokasi biaya yang telah ditetapkan, dimana akan berpengaruh signifikan terhadap proses pendidikan yang berkualitas.

F. Hipotesis

Penelitian ini akan menguji hipotesis mengenai manajemen pembiayaan pendidikan dan pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan, hipotesis tersebut adalah hipotesis utama yang akan diuji secara statistik dalam bentuk :

“Terdapat pengaruh yang signifikan antara Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan”.

Analisa hipotesis tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam hipotesis kerja penelitian sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah menurut dimensi pembiayaan pendidikan terhadap kualitas pendidikan, yaitu :

“Manajemen pembiayaan pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas pendidikan”.

G. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran empiris yang tepat dan jelas mengenai fenomena faktor-faktor pembiayaan pendidikan dan pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Umum (SMU).

Untuk mencapai maksud tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi mengenai manajemen pembiayaan pendidikan
2. Mengumpulkan informasi mengenai kualitas pendidikan dengan melihat dari aspek pengelolaan biaya pendidikan yang dijalankan oleh manajemen sekolah.
3. Mengumpulkan informasi mengenai pengaruh antara manajemen pembiayaan pendidikan dengan kualitas pendidikan.

H. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat, terutama berkaitan dengan upaya-upaya pengelolaan biaya pendidikan dan upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Umum, adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Teoritis)
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai pengaruh faktor biaya langsung (direct cost) terhadap peningkatan kualitas pendidikan
 - b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk pendalaman penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan biaya pendidikan secara utuh
 - c) Memperkaya khasanah penulisan yang berhubungan dengan pengelolaan biaya pendidikan
2. Untuk Kebijakan (Praktis)
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi untuk semakin memperhatikan penetapan biaya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Umum.
 - b) Kajian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para pengambil keputusan, khususnya untuk pengelola dibidang Pendidikan.

I. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis yang menelaah tentang manajemen pembiayaan pendidikan dan pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan pada sekolah menengah umum di wilayah kota Bandung Provinsi Jawa Barat terdiri atas lima Bab, yang disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal dari tesis ini yang memuat latar belakang, permasalahan penelitian, kerangka penelitian, asumsi dan hipotesis kerja, tujuan penelitian, manfaat penelitian, paradigma penelitian dan sistematika tesis yang dibai as satu persatu.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan dukungan teori tentang berbagai kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang manajemen pembiayaan pendidikan dalam kontek pendekatan kualitas pendidikan.

Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, subjek penelitian, definisi operasional, variable penelitian dan pengukurannya, lokasi penelitian, disain penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis dan sub hipotesis penelitian, pelaksanaan penelitian, analisis data dan validasi data penelitan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam uraiannya dijelaskan tentang deskripsi objek penelitian manajemen pembiayaan pendidikan dalam kontek pendekatan kualitas pendidikan.

Bab V Kesimpulan, membahas tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.



Tesis yang terdiri dari lima bab ini diengkapi juga dengan (1) Judul;
(2) Nama dan Kedudukan Pembimbing; (3) Kata Pengantar; (4) Abstraksi;
(5) Daftar Isi; (6) Daftar Tabel; (7) Daftar Gambar; (8) Daftar Lampiran; (9)
Daftar Pustaka; (10) Lampiran-lampiran; dan (11) Riwayat Hidup

